



# LKPJ 2022

Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban SKPD



**Dinas Penanaman  
Modal dan PTSP  
Kabupaten Tanah Laut**



[www.dpmptsptanahlautkab.go.id](http://www.dpmptsptanahlautkab.go.id)

(0512) – 22323

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKPJ SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Dasar penyusunan LKPJ ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 130/3425/PEM/2022 Perihal Permintaan Dokumen LKPJ, Tabel IKK LPPD, Laporan Penerapan SPM Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2022 serta penginputan IKK Outcome dan Output LPPD ke e-LPPD Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan kepada DPRD dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun yang telah berjalan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders*. Dengan kerendahan hati, diharapkan adanya saran serta masukan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Tanah Laut,

**Ir. SUHARYO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19640502 198703 1 020**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar.....</b>	i
<b>Daftar Isi.....</b>	ii
<b>Daftar Tabel.....</b>	iii
<b>BAB I   Pendahuluan.....</b>	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2   Visi dan Misi Kepala Daerah.....	3
1.2.1. Visi RPJMD.....	3
1.2.2. Misi RPJMD.....	3
1.3   Data Umum Daerah.....	4
1.3.4. Jumlah PNS.....	4
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	4
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	5
1.3.7. Realisai Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	5
<b>BAB II   Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....</b>	6
2.1. Program dan Kegiatan pada DPA Murni 2022.....	6
2.2. Program dan Kegiatan pada DPA Pergeseran 2022.....	7
2.3. Program dan Kegiatan pada DPA Perubahan 2022.....	8
<b>BAB III   Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.....</b>	13
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	13
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	14
3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	21
3.3.Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	21
<b>BAB IV   Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.....</b>	22
<b>BAB V   Penutup.....</b>	23
5.1. Simpulan.....	23
5.2. Keberhasilan.....	23

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.3.4.1 PNS pada DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut.....	4
Tabel 1.3.5.1 Realisasi Pendapatan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut.....	4
Tabel 1.3.6.1 Realisasi Belanja DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut.....	5
Tabel 2.3.1 Program Kegiatan DPMPTSP Kab. Tanah Laut.....	9
Tabel 3.1.1 Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut.....	13
Tabel 3.1.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	14
Tabel 3.2 Kebijakan Strategis.....	21
Tabel 3.3 Tindak Lanjut DPRD Kabupaten Tanah Laut.....	21
Tabel 3.2 Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2021.....	23
Tabel 3.3 Realisasi Program Kegiatan DPMPTSP TA 2021.....	27

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar penyusunan Laporan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230).
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

## 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

### 1.2.1. Visi RPJMD

Visi merupakan kondisi ideal dan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Visi diperlukan untuk menjadi tuntutan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas organisasi. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat sesuai dinamika kehidupan, citra dan peran Pemerintah Kabupaten serta kepekaannya pada situasi yang ada. Selain itu, visi harus inspiratif dan dapat memberi motivasi kepada suatu anggota organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi”** (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi).

### 1.2.2. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Dikaitkan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait erat dengan penjabaran Misi ke-1 RPJMD yaitu **“Berkarya Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya”** dan Misi ke-5 RPJMD yaitu

**“Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.**

### 1.3. Data Umum Daerah

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum meliputi:

#### 1.3.4. Jumlah PNS

Adapun jumlah PNS sebagai sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.4.1  
PNS pada DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut  
Per 31 Desember 2022

No.	Jabatan	Orang	Keterangan
1.	Esselon II	1	Plt. Kepala Dinas
2.	Esselon III	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3.	Esselon IV	3	Kepala Sub Bagian
4.	Pelaksana	9	Staf
Jumlah		18	

#### 1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berikut di bawah ini rincian realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan:

Tabel 1.3.5.1  
Realisasi Pendapatan DPMPTSP Kab. Tanah Laut  
Per 31 Desember 2022

Uraian	Target		Realisasi			
	2021	2022	%	2021	%	2022
PENDAPATAN DAERAH	1.178.349.000	1.700.000.000	85,33	1.005.450.504	68,00	1.155.915.407
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.178.349.000	1.700.000.000	85,33	1.005.450.504	68,00	1.155.915.407
Retribusi Persampahan	262.549.000	375.650.000	118,20	310.320.000	59,87	224.910.000
Retribusi IMB	915.800.000	1.324.350.000	75,90	695.130.504	70,27	930.555.407
Jumlah Pendapatan	1.178.349.000	1.700.000.000	85,33	1.005.450.504	68,00	1.155.915.407



1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berikut di bawah ini rincian realisasi belanja menurut jenis belanja:

Tabel 1.3.6.1  
Realisasi Belanja DPMPTSP Kab. Tanah Laut  
Per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran		Realisasi			
	2021	2022	%	2021	%	2022
BELANJA DAERAH						
BELANJA OPERASI	6.831.609.174	5.369.785.777	58,27	3.979.865.571	73,43	3.943.289.969
Belanja Pegawai	4.697.008.016	3.869.219.440	59,25	2.782.856.978	68,51	2.650.705.755
Belanja Barang dan Jasa	2.134.601.158	1.500.566.337	59,08	1.197.008.593	86,14	1.292.584.214
BELANJA MODAL	212.354.350	22.659.263	98,38	208.908.250	89,59	20.300.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.664.350	22.659.263	96,67	79.908.250	89,59	20.300.000
Belanja Modal Aset Lainnya	129.690.000	0	99,47	129.000.000	0	0
Jumlah Belanja	7.043.963.524	5.392.445.040	59,47	4.188.773.821	73,50	3.963.589.969

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan  
(Tidak Ada)

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **2.1. Program dan Kegiatan pada DPA Murni 2022**

Untuk mewujudkan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai Visi dan Misi Daerah kebijakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian dijabarkan dalam program-program kerja Lima Tahunan dan Program Kerja Tahunan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dimaksud untuk Tahun 2022 adalah:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 5) Penyediaan Bahan/Material
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. Program Promosi Penanaman Modal**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

## **3. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
  - 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

## **4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

### **2.2. Program dan Kegiatan pada DPA Pergeseran 2022**

Pada tanggal 21 Februari 2022 terbit DPPA 2022 yang mengakomodir Program/Kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus-Non Fisik.

#### **1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

### **2.3. Program dan Kegiatan pada DPA Perubahan 2022**

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) pada dasarnya memuat perubahan baik anggaran maupun program/kegiatan yang dijalankan oleh SKDP. Berikut rincian dari DPA Perubahan 2022:

Tabel 2.3.1.  
Program Kegiatan DPMPTSP Kab. Tanah Laut  
Tahun Anggaran 2022

Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
<b>URUSAN PEMERINTAHANAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>4.980.545.811</b>		<b>5.392.445.040</b>	<b>411.899.229</b>
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>IKM 80 Nilai</b>	<b>4.579.976.658</b>	<b>IKM 80 Nilai</b>	<b>4.699.222.587</b>	<b>119.245.929</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%	5.672.222	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%	5.672.222	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD 6 Dokumen	5.672.222	Jumlah Dokumen Renja SKPD 6 Dokumen	5.672.222	0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%</b>	<b>3.872.459.451</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%</b>	<b>3.872.459.451</b>	<b>0</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan	3.869.219.440	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14 Bulan	3.869.219.440	0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 67 Laporan	3.240.011	Jumlah Laporan Keuangan 67 Laporan	3.240.011	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%</b>	<b>165.621.630</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%</b>	<b>261.670.893</b>	<b>96.049.263</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis 13 Jenis	5.880.035	Jumlah Jenis 13 Jenis	5.880.035	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis 11 Jenis	49.532.395	Jumlah Jenis 4 Jenis	72.191.658	22.659.263
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak 11 Jenis	34.959.200	Jumlah Jenis Barang Cetak 11 Jenis	34.959.200	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku 7 Buku Jumlah Eksemplar Koran 480 Eksemplar	6.960.000	0	0	(6.960.000)
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Event	11.000.000	Jumlah Event	13.000.000	2.000.000

LKPJ-SKPD – DPMPTSP 2022

Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
	2 Event		2 Event		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat 10 Kali Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 320 Kali Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 60 Kali	57.290.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	135.640.000	78.350.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</b>	<b>430.323.355</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</b>	<b>453.520.021</b>	<b>23.196.666</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Rekening Air, Listrik, dan Rekening Telepon 12 Bulan Jumlah Bulan Rekening TV Kabel 24 Bulan	80.468.950	Jumlah Rekening Air dan Listrik 12 Bulan	79.468.950	(1.000.000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor 21 Jenis Jumlah Materai 500 Lembar Jumlah Orang PTT 14 Orang	349.854.405	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor 21 Jenis Jumlah Materai 500 Lembar Jumlah Orang PTT 15 Orang	374.051.071	24.196.666
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</b>	<b>105.900.000</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</b>	<b>105.900.000</b>	<b>0</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan 11 Buah	100.000.000	Jumlah Kendaraan 11 Buah	100.000.000	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis 11 Jenis	5.900.000	Jumlah Jenis 9 Jenis	5.900.000	0
<b>PROMOSI PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Capaian Realiasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>	<b>120.539.315</b>	<b>Capaian Realiasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>	<b>86.918.315</b>	<b>(33.621.000)</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>	<b>120.539.315</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>	<b>86.918.315</b>	<b>(33.621.000)</b>
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran 2 Kali Jumlah Bimtek/Sosialisasi 6 Kali	120.539.315	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran 2 Kali	86.918.315	(33.621.000)

Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
<b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Capaian Realiasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>	<b>153.485.946</b>	<b>Capaian Realiasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>	<b>115.856.646</b>	<b>(37.629.300)</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>	<b>153.485.946</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>	<b>115.856.646</b>	<b>(37.629.300)</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan Penanaman Modal Jasa Usaha 2.895 Izin Jumlah Perizinan Tertentu 503 Izin Jumlah Perizinan Penanaman Modal Baru 232 Izin	60.000.000	Jumlah Bimtek 1 Kali Jumlah Perizinan Penanaman Modal Jasa Usaha 2.000 Izin Jumlah Perizinan Tertentu 300 Izin	42.380.700	(17.619.300)
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah LKPM 4 Laporan	72.000.000	Jumlah LKPM 4 Laporan	51.990.000	(20.010.000)
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Rekap Pengaduan 4 Dokumen Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 2 Dokumen	21.485.946	Jumlah Dokumen Rekap Pengaduan 4 Dokumen Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 2 Dokumen	21.485.946	0
<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (DAK Non Fisik)</b>	<b>Capaian Realiasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>	<b>56.000.000</b>	<b>Capaian Realiasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>	<b>419.903.600</b>	<b>363.903.600</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>	<b>56.000.000</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>	<b>419.903.600</b>	<b>363.903.600</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	Jumlah Pelaku Usaha Peserta Bimtek/Sosialisasi 217 Orang Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	358.189.800	358.189.800

Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang)
	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Pengawasan 4 Laporan	56.000.000	Laporan Hasil Pengawasan 4 Laporan	61.713.800	5.713.800
<b>PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>IKM 80 Nilai</b>	<b>70.543.892</b>	<b>IKM 80 Nilai</b>	<b>70.543.892</b>	<b>0</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100%</b>	<b>70.543.892</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100%</b>	<b>70.543.892</b>	<b>0</b>
Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Brosur 50 Lembar Jumlah Dokumen Rekap Perizinan 12 Dokumen Jumlah Dokumen SOP 1 Dokumen Jumlah Poster 15 Lembar Jumlah Profil 15 Buku Jumlah Kegiatan Sosialisasi 4 Kali	70.543.892	Jumlah Brosur 50 Lembar Jumlah Dokumen Rekap Perizinan 12 Dokumen Jumlah Dokumen SOP 1 Dokumen Jumlah Poster 15 Lembar Jumlah Profil 15 Buku	70.543.892	0



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah disusun. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. Berikut ini tabel yang dimaksud:

Tabel 3.1.1

Sasaran Strategis DPMPTSP Kab. Tanah Laut

Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi		Ket.
			2021	2022	2021	2022	
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	931.824.000	978.415.000	773.620.960 (83,02%)	1.422.824.060 (145,42%)	Dalam Ribu Rupiah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80,00	80,00	89,46 (111,83%)	89,47 (111,84%)	

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1.2.  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
DPMPTSP Kab. Tanah Laut  
Tahun Anggaran 2022

No.	Urusan Pemerintahan Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Meningkatkan Pelayanan dan Promosi Potensi Investasi	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM 80 Nilai	IKM 89,47 Nilai			-
			2. Meningkatkan Pemantauan dan Pengawasan Investasi terhadap Pelaku Usaha	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %			-
			3. Penguatan Regulasi dan Pengembangan Penanaman Modal	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD 6 Dokumen	Jumlah Dokumen Renja SKPD 6 Dokumen	-	-	-
			4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%			-
			5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur DPMPTSP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14 Bulan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14 Bulan	1. Kekosongan Posisi Kepala Dinas	Di Tahun Anggaran 2023 Posisi Kedua Jabatan	-

No.	Ururan Pemerintahan Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			6. Merumuskan Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				2. Tidak Terealisasinya Gaji Kasubbag Umpeg Karena Masih dijabat oleh Plt.	yang Kosong Tersebut Telah diisi.	
			7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Dinas	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan 67 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan 67 Laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis 13 Jenis	Jumlah Jenis 13 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis 4 Jenis	Jumlah Jenis 4 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak 11 Jenis	Jumlah Jenis Barang Cetak 11 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Event 2 Event	Jumlah Event 2 Event	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Kurangnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Menggeser Anggaran dari Bidang Lain di APBD Perubahan	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%			

No.	Ururan Pemerintahan Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Rekening Air dan Listrik 12 Bulan	Jumlah Bulan Rekening Air dan Listrik 12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor 21 Jenis Jumlah Materai 500 Lembar Jumlah Orang PTT 15 Orang	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor 21 Jenis Jumlah Materai 500 Lembar Jumlah Orang PTT 15 Orang	-	-	-
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan 11 Buah	Jumlah Kendaraan 11 Buah	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis 9 Jenis	Jumlah Jenis 9 Jenis	-	-	-
				<b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Capaian Realisasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>				
				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</b>				

No.	Urusan Pemerintahan Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<b>Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100%</b>				
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi/ Kegiatan 2 Kali	Jumlah Kegiatan Promosi/ Kegiatan 2 Kali	Tidak tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Berupa Biaya Transportasi, Penginapan, dan Uang Harian	Menyiapkan Alokasi Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Telah Dilaksanakan Promosi Investasi Baik di Dalam Provinsi maupun di Luar Provinsi
				<b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Capaian Realisasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>				
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%				
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Bimtek 1 Kali Jumlah Perizinan Penanaman Modal Jasa Usaha 2.000 Izin Jumlah Perizinan Tertentu 300 Izin	Jumlah Bimtek 1 Kali Jumlah Perizinan Penanaman Modal Jasa Usaha 2.204 Izin Jumlah Perizinan Tertentu 364 Izin	1. Adanya penambahan persyaratan bagi pelaku usaha khususnya untuk CV dan PT yaitu harus melampirkan bukti lunas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 2. Tidak ada aturan yang mengatur batas waktu maksimal penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari SKPD terkait	1. Memberikan waktu tambahan kepada pemohon izin untuk melengkapi bukti lunas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sehingga pemohon tetap bisa mengajukan berkas izinnnya 2. Memerintahkan kepada pemohon	-

No.	Urusan Pemerintahan Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								untuk membuat surat pernyataan di atas materai tindak lanjut dari tambahan waktu yang diberikan oleh petugas terkait permohonan izin 3. Sudah disampaikan kepada SKPD terkait pada <i>Coffee Morning</i>	
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan LKPM 4 Laporan	Laporan LKPM 4 Laporan	Kurangnya Jumlah Alat Transportasi	Menyediakan Alat Transportasi	Telah Melakukan Peningkatan Pengawasan Perusahaan pada Bidang Penanaman Modal
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Rekap Pengaduan 4 Dokumen Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekap Pengaduan 4 Dokumen Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 4 Dokumen			
				<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (DAK Non Fisik)</b>	<b>Capaian Realisasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>	<b>Capaian Realisasi Kesepakatan Pelaku Investasi 6 Skor</b>			
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang			

No.	Urusan Pemerintahan Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<b>Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>	<b>menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Peserta Bimbingan Teknis/ Sosialisasi 217 Orang Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha 8 Kegiatan Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Peserta Bimbingan Teknis/ Sosialisasi 217 Orang Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha 8 Kegiatan Usaha	Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Penanaman Modal	Meminta Bantuan kepada Bidang Lain	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Pengawasan 4 Laporan	Laporan Hasil Pengawasan 4 Laporan	Kurangnya Jumlah Alat Transportasi	Menyediakan Alat Transportasi	Telah Melakukan Peningkatan Pengawasan Perusahaan pada Bidang Penanaman Modal
				<b>PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>IKM 80 Nilai</b>	<b>IKM 89,47 Nilai</b>			
				<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100%</b>			
				Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Brosur 50 Lembar Jumlah Dokumen Rekap Perizinan	Jumlah Brosur 50 Lembar Jumlah Dokumen Rekap Perizinan	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Dokumen Jumlah Dokumen SOP 1 Dokumen Jumlah Poster 15 Lembar Jumlah Profil 15 Buku	12 Dokumen Jumlah Dokumen SOP 1 Dokumen Jumlah Poster 15 Lembar Jumlah Profil 15 Buku			



### 3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis ini meliputi peraturan kepala daerah dalam hal ini Bupati Tanah Laut dan keputusan atau tindakan Bupati dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran yakni tahun anggaran 2022. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh Bupati Tanah Laut dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Kebijakan Strategis  
Tahun Anggaran 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan

### 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD Kabupaten Tanah Laut yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya yakni 2021. Laporan tentang tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selaku pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD Kabupaten Tanah Laut yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.3.  
Tindak Lanjut DPRD Kabupaten Tanah Laut N-1  
Tahun Anggaran 2022

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Melakukan promosi investasi baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi	Setelah berakhirnya pandemi covid-19, ditindaklanjuti dengan melakukan promosi investasi di luar daerah dan di dalam daerah	Terjadi peningkatan realisasi investasi
2.	Melakukan peningkatan pengawasan perusahaan pada bidang penanaman modal	Pengawasan dan pemantauan di lapangan serta melalui aplikasi LKPM Online dan OSS telah dilaksanakan	Laporan LKPM meningkat, realisasi investasi meningkat

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan-Pembantuan**

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

**(Tidak Ada)**

#### **4.2. Hambatan Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

**(Tidak Ada)**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. SIMPULAN**

Adapun simpulan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 terdiri dari:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang diimplementasikan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Pada tahun ketiga Renstra yakni 2022, target sasaran renstra yang telah ditetapkan dalam tahun Renja dapat tercapai dengan rincian realisasi investasi Rp 1.422.824.060.000,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 978.415.000.000,00 (145,42%).
2. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang membutuhkan penanganan dengan efektif dan efisien. Oleh Karena itu diperlukan kerja sama yang baik antar internal maupun eksternal kantor. Di samping itu harus ada komitmen bersama baik secara vertikal maupun horizontal.

#### **5.2. KEBERHASILAN**

##### **5.2.1. Prestasi yang dicapai SKPD**

1. Mendapat Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022 Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menjadi SKPD lokus penilaian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 untuk Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan Predikat KEPATUHAN TINGGI (Zona Hijau) untuk Kategori Pemerintah Kabupaten.

##### **5.2.2. Prestasi yang dicapai oleh Lembaga atau Masyarakat Binaan SKPD (Tidak Ada)**